

LAPORAN
HASIL RAPAT BADAN ANGGARAN DAN RAPAT PIMPINAN GABUNGAN
DPRD PROVINSI DKI JAKARTA BERSAMA TAPD
TANGGAL 15 APRIL 2025

Berdasarkan Surat Undangan Ketua DPRD Prov. DKI Jakarta, No. 275/RB.05 dan No. 276/RB.05

Hari : **Selasa**
Tanggal : **15 April 2025**
Pukul : **10.00 WIB dan pukul 15.30 WIB**
Tempat : **Ruang Rapat Paripurna DPRD lantai III Gedung DPRD DKI Jakarta**
Acara : **1. Laporan hasil pembahasan Komisi-Komisi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024;**
2. Merumuskan Rancangan Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024;
3. Penelitian akhir terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024.

Pemimpin Rapat : **Drs. H. Khoirudin, M.Si**

HADIR :

I. Para Wakil Ketua DPRD :

1. Ima Mahdiah : Wakil Ketua DPRD
2. Rany Mauliani : Wakil Ketua DPRD
3. Wibi Andrino : Wakil Ketua DPRD

II. Pimpinan dan Anggota DPRD :

1. Drs. H. Achmad Yani, M.Pd : Anggota Banggar
2. H. Ismail, S.Pd : Anggota Banggar/Ketua Fraksi PKS
3. Ade Suherman, S.Kom : Anggota Banggar
4. Suhud Alynudin, S.IP., M.Sc : Anggota Banggar/Sekretaris Komisi C
5. Dr.H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA : Anggota Banggar
6. Drs. KH. Muhammad Thamrin, MM : Anggota Banggar/Ketua Komisi E
7. Drs. HM. Taufik Zoelkifli., MM : Anggota Banggar/Fraksi PKS
8. Yuke Yurike, ST., MM : Anggota Banggar/Ketua Komisi D
9. Agustina Hermanto, S.Kom., MM : Anggota Banggar/Wk.Ketua Komisi E
10. Wa Ode Herlina, S.I.Kom : Anggota Banggar
11. Pandapotan Sinaga, SE., MM : Anggota Banggar/Wk.Ket.Fraksi PDI P
12. Ir. Manuara Siahaan : Anggota Banggar
13. Inggard Joshua, SE : Anggota Banggar/Ketua Komisi A
14. Ir.H. Wahyu Dewanto, ST., SH., MH : Anggota Banggar/Wk.Ketua Komisi B
15. Ali Hakim Lubis, SH., MH : Anggota Banggar
16. Nova Harivan Paloh, SE., MM : Anggota Banggar/Ketua Komisi B
17. Jupiter, SE., MM : Anggota Banggar/Ketua Fraksi Nasdem
18. Judistira Hermawan, B.Buss : Anggota Banggar/Ketua Fraksi Golkar
19. Alia Noorayu Laksono : Anggota Banggar/Wk.Ketua Komisi A
20. H. Ramly HI. Muhammad, S.Sos.,M.Si : Anggota Banggar/Wk.Ket. Fraksi Golkar
21. M. Fu'adi Luthfi : Anggota Banggar/Ketua Fraksi PKB
22. Husen, SH : Anggota Banggar/Ketua Fraksi PAN
23. Mujiyono, SE : Anggota Banggar
24. H. Ali Muhammad Johan C : Anggota Banggar/Ketua Fraksi Demokrat

- 25. Desie Christhyana Sari, SE.,M.Ikom : Anggota Banggar/Wk. Ket. Fraksi Demokrat
- 26. Justin Adrian, SH., MH : Anggota Banggar/Sekr.Komisi E
- 27. August Hamonangan, SH., MH : Anggota Banggar
- 28. Ir. Bun Joi Phiau, ST.,MH.,MH : Anggota Banggar

III. **Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) :**

- 1. H. Marullah Matali, Lc., M.Ag : Sekda Prov. DKI Jakarta
- 2. Suharini Eliawati : Plt.Asisten Perekonomian dan Keuangan
- 3. Afan Adriansyah : Asisten Pembangunan & Lingk.Hidup
- 4. Suharini Eliawati : Plt. Asisten Kesejahteraan Rakyat
- 5. Tri Indrawan : Wakil Kepala BPPD DKI Jakarta
- 6. Elvarinsa : Wakil Kepala Bapenda DKI Jakarta
- 7. Faisal Syafruddin : Kepala Suku BPAD
- 8. Nasruddin Djoko S. : Ka. BP. BUMD
- 9. Sigit Pratama Yudha : Ka. Biro Hukum Setda

IV. **Sekretariat DPRD :**

- 1. Augustinus, SE., MM : Plt. Sekretaris DPRD DKI Jakarta
- 2. Saria D.A.G. Sinaga, S.STP., MA : Kabag Perencanaan dan Keuangan
- 3. Asril P. Ritonga, SH., M.Si : Kabag. Umum
- 4. Nur Achmad : Plt.Kabag Produk Hukum dan Persidangan
- 5. Para Staf Subbag. Persidangan dan Risalah
- 6. Para Staf Komisi A, B, C, D dan E

V. Berikut dilaporkan hasil Rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta pukul 10.00 dan dilanjutkan Rapat Pimpinan DPRD pukul 15.30, tanggal 15 April 2025, sebagai berikut :

- 1. Rapat Badan Anggaran dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari pembahasan dan pendalaman terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2024 oleh Komisi-Komisi yang telah dilaksanakan tanggal 10 s.d. 12 April 2024 di Gedung DPRD DKI Jakarta.
- 2. Berdasarkan hasil Laporan yang disampaikan Komisi A, B, C, D dan E, maka beberapa hal yang dapat direkomendasikan antara lain:
 - a. **Komisi A (Bidang Pemerintahan),**
DPRD meminta Walikota dengan Kantor Pertanahan di lima wilayah Kota se-Jakarta agar memberikan kepastian informasi tindak lanjut permohonan PTSL, dikarenakan masih banyak warga yang belum menerima sertifikat tanah dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) padahal warga telah menyerahkan berkas Akta Jual Beli (AJB) asli ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk pembuatan sertifikat melalui Program PTSL.
 - b. **Komisi B (Bidang perekonomian),**
 - 1) DPRD DKI Jakarta merekomendasikan Pemprov DKI Jakarta untuk dapat melakukan persebaran dan kemudahan akses yang merata terutama di wilayah pinggiran atau kawasan padat penduduk yang jauh dari pusat kota.
 - 2) Dishub DKI Jakarta diharapkan dapat meningkatkan sistem manajemen transportasi berbasis digital seperti informasi real-time perjalanan, pemantauan kemacetan, serta sistem tiket terintegrasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pengguna.

- 3) Dishub DKI Jakarta diminta untuk meningkatkan implementasi teknologi informasi untuk sistem pemantauan lalu lintas, pelaporan kondisi jalan, penjadwalan angkutan umum dan sistem pembayaran digital yang terintegrasi dan mudah diakses masyarakat. Perlunya pengembangan sistem manajemen lalu lintas cerdas berbasis teknologi AI untuk mengurangi kemacetan,
- c. **Komisi C (Bidang Keuangan),**
- 1) Merekomendasikan peningkatan serapan belanja modal untuk pembangunan gedung dan fasilitas pelayanan dasar seperti puskesmas.
 - 2) Pemprov DKI Jakarta juga perlu melakukan percepatan proses Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), evaluasi insentif pajak kendaraan listrik, serta penagihan tunggakan pajak kendaraan, termasuk milik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
 - 3) Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) diminta meningkatkan transparansi pemanfaatan aset, termasuk meninjau ulang tarif sewa resto apung di Muara Karang dan regulasi pengelolaan aset.
 - 4) Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (BPPBJ) diminta mengevaluasi proses pengadaan, sementara Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) perlu menyesuaikan target retribusi dengan capaian di lapangan.
 - 5) Badan usaha milik daerah (BUMD) diminta untuk meningkatkan sinergi, inovasi, dan ketahanan bisnis. PT. Food Station misalnya, diminta memperluas jaringan distribusi dan pasar murah. PT. Jakarta Tourisindo juga diharapkan mempercepat revitalisasi Grand Cempaka Resort, dan Bank DKI diminta memperbaiki layanan mobile banking.
- d. **Komisi D (Bidang Pembangunan),**
- 1) Pemanfaatkan lahan aset yang tidak terpakai dan memperluas RTH yang mana dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset yang dimiliki oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.
 - 2) Pemeliharaan RTH harus ditingkatkan dan diminta berkolaborasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan perlu adanya evaluasi kembali terhadap pemeliharaan RTH, baik kondisi taman, hutan kota, maupun makam yang masih minim pepohonan atau kurang terawat.
- e. **Komisi E (Kesejahteraan Masyarakat),**
- 1) Merekomendasikan reformasi pendataan seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), efektivitas program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), dan perbaikan layanan berbasis dampak nyata ke Masyarakat. Program bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan diharapkan memperhatikan perihal ketepatan sasaran, keterbukaan data, dan koordinasi antar pihak.
 - 2) Dinas Pendidikan diharapkan untuk meningkatkan kualitas data penerima KJP dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Dinas Pendidikan juga harus mengevaluasi dampak dari program yang dijalankan.
 - 3) Di bidang Kesehatan memperhatikan pemerataan akses layanan, terutama di wilayah padat penduduk dan Kepulauan Seribu, serta infrastruktur puskesmas, rumah sakit umum daerah (RSUD),.
 - 4) Dinas Kebudayaan dan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) melalui program Pemberdayaan budaya harus melibatkan komunitas, serta memberikan penghargaan konkret kepada maestro budaya dan seniman lintas generasi.
 - 5) Dinas PPAPP, diminta melakukan penambahan Pos Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) di luar Ruang Publik Terpadu Ramah

Anak (RPTRA), serta mendorong kolaborasi dengan operator transportasi publik dalam menangani kekerasan di ruang publik. Pembangunan karakter harus ditekankan dalam program seperti Pos SAPA dan rumah ibadah sebagai pusat edukasi

3 Pendapat, saran dan Usulan DPRD :

- a. Perkuatan kinerja ASN di masing-masing SKPD di wilayah Pemprov DKI Jakarta. Perlu evaluasi terhadap Camat / Lurah di wilayah yang sama tidak dan berubah-ubah selama bertahun-tahun
- b. Pembangunan Puskesmas di Kayu Putih tanah milik Pulomas Jaya anak perusahaan Jakpro, tidak mendapatkan persetujuan dan sampai sekarang tidak terlaksana padahal kebutuhan puskesmas di daerah tersebut tinggi.
- c. Perlu ditinjau kembali bagi penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang dicabut terutama yang benar-benar memerlukan.
- d. DPRD menilai perlu penambahan rute JakLinko sebagai transportasi yang terintegrasi di 2 rute baru yaitu terminal Pulo Gebang-Terminal Tanjung Priok dan Bekasi Pal Jaya – Rusun Marunda.
- e. Peninjauan kembali Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang kembali dibebankan kepada warga terutama yang berpenghasilan rata-rata dan tanah yang dimiliki bernilai dibawah 1 milyar.
- f. PPSU yang tidak berdomisili di Jakarta masih banyak di lapangan padahal masih banyak warga di Jakarta di daerah terkait yang tidak memiliki pekerjaan tetap.
- g. Penyelesaian pembangunan Waduk Cilincing yang sampai saat ini belum juga terselesaikan sudah berjalan 6 tahun, agar menjadi perhatian terkait kendala dan solusinya.
- h. Guna memperluas lapangan pekerjaan, perlu lebih banyak kerja sama dengan Perusahaan-Perusahaan dan dengan Sister City Kota Jakarta terkait Tenaga Kerja.
- i. Jalan rusak yang belum diperbaiki di daerah Kelapa Gading, terutama jalan yang sudah diserahkan terimakan kepada Pemprov DKI Jakarta
- j. Dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bagi warga Jakarta yang tinggal di Rusunawa milik Pemprov DK Jakarta, dengan menghapuskan bunga sewa Rusun
- k. Fogging harus dilakukan tanpa menunggu ada korban DBD dahulu baru dilaksanakan
- l. Pengadaan Septiktank rumah belum semua rumah di Jakarta tersedia
- m. Guru-guru yang distribusikan tidak sesuai kebutuhan guru di sekolah tersebut, juga penempatan guru yang terlalu jauh dari tempat tinggalnya. Kasubbag TU yang hanya mengurus satu sekolah setingkat eselon 4 berada di atas Kasaklak yang mengurus banyak sekolah namun hanyalah non ASN

4. Penjelasan Eksekutif :
 - a. Sekda mewakili eksekutif menyetujui apa yang menjadi rekomendasi dari Dewan
 - b. Pihak Eksekutif siap berkolaborasi dengan DPRD untuk menjalankan program-program yang bermanfaat untuk masyarakat. Dan Eksekutif berharap perekonomian Jakarta di Tahun 2025 akan terus meningkat dan seluruh program serta kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana.

5. Berdasarkan pendapat dan saran dari Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran, Pimpinan Fraksi, Pimpinan Komisi DPRD, serta penjelasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), disepakati hal sebagai berikut :
 - a. Dari Rencana Pendapatan Daerah sebesar Rp. 74,95 triliun, dapat terealisasi sebesar Rp. 72,95 triliun atau 97,33 persen.
 - b. Realisasi Belanja Daerah dapat di sampaikan bahwa pada akhir tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 70,01 triliun atau mencapai 92,09 persen dari target yang direncanakan sebesar Rp. 76,02 triliun
 - c. LKPJ 2024 Pemprov DKI Jakarta dapat diterima oleh DPRD DKI Jakarta
 - d. Selanjutnya akan disampaikan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap LKPJ 2024 dalam rapat paripurna.
 - e. Hasil Rapat Badan Anggaran ini juga merupakan hasil Rapat Pimpinan Gabungan DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Jakarta, 15 April 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA
KETUA,**



Drs. H. KHOIRUDIN, M.Si

**Pit. SEKRETARIS DPRD PROVINSI
DKI JAKARTA**



**AUGUSTINUS, SE., MM
NIP 197908052008011010**